BAB IV

ANALISIS DATA

A. Temuan Penelitian

1. Penggunaan Artis Untuk Membohongi Publik

Dalam dunia pemasaran komunikasi politik, bentuk promosi yang kontraversial sebetulnya merupakan salah satu cara yang paling efektif dan tentu saja efisien dalam memperkenalkan suatu produk (partai atau calon pemimpin dalam hal ini). *"If you want to be popular, you have to be contraversial"*. Dikatakan efektif karena mampu mengundang perhatian publik secara berlebihan, dan efisien karena biasanya *cost* yang dikeluarkan relatif kecil. Melalui kontraversinya, jas merah dan partainya mengajak khalayak sasarannya untuk terlibat secara langsung.

Dalam kaitanya dalam komunikasi politik, stategi, kiat, maupun trik-trik yang dilakukan dalam kampanye politik boleh berkembang dan menjadi tontonan yang menarik, asalkan menghargai kompetitor atau lawan.

Keterlibatan para selebritis berkecimpung dalam dunia politik tentusaja menimbulkan pro dan kontra. Fenomena ini menjadi perdebatan dari dahulu hingga sekarang. Bagi masyarakat yang pro tentu saja memandang hal ini sebagai hak asasi manusia dan sifatnya sah-sah saja para artis untuk mencalonkan dirinya ke ranah perpolitikan dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Berbeda halnya bagi kalangan yang kontra atau kelompok yang menentang tentu saja menolak karena menganggap bahwa para selebritis cenderung mangandalkan penampilan fisik dibandingkan wawasan dan keahlian dalam kemampuan dalam berpolitik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara konstitusional, setiap warga negara berhak untuk terlibat dalam kegiatan politik. Demikian halnya dalam kalangan artis yang *notabene* mereka juga warga negara biasa sehingga tidak ada yang dapat melarang seorang artis untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik.

Dari segi dukungan selebritis mengeruk dukungan terbanyak karena popularitas yang mereka miliki serta untuk eksistensi partai politik yang menaungi mereka. Dalam sosialisasi politik terdapat faktor eksistensi politik, salah satunya popularitas tokoh partai. Hal inilah teraplikasi dalam wajah perpolitikan di Indonesia.

Hubungan antara politisi dan artis sudah berjalan sekian lama. Hubungan itu hampir sama dengan hubungan antara politisi dengan wartawan (media). Di satu sisi politisi memerlukan artis dalam menggalang massa di tempat-tempat terbuka. Massa senang sekali mendengar nyanyian-nyanyian dari para artis.

Seorang selebritis selain karena kemampuannya dalam bidang tertentu, terutama musik dan olahraga, juga memiliki wajah yang *telegenic* atau *camera face* dalam televisi.Oleh karena itu, seorang selebritis selain tampil karena kemampuan dalam bidang tertentu, juga dibesarkan oleh citra (*image*) yang dibentuk oleh liputan media.

Dalam praktik politik, teknik-teknik untuk menarik perhatian khalayak juga banyak dilakukan dengan mendatangkan serta menggandeng para artis untuk kampanye atau menjadi partner politik.

Di Indonesia, masa kampanye politik merupakanmasa panen bagi artis. Banyak partai mengajak mereka tampil dengan honor tinggi, khususnya bagi artis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sedang naik daun. Dalam pemilu legislatif 2004, golkar merupakan partai yang paling banyak menggerakkan artis untuk berkampanye.[67]

Dalam catatan KPU tentang daftar calon anggota DPR RI, ada sejumlah artis atau selebriti yang ikut jadi calon dan sekaligus sebagai juru kampanye, misalkan dari PDIP tercatat Marissa Haque dan Dedy Sutomo, dari Golkar tercatat Renny Jayusman dan Nurul Arifin, dari PAN tercatat Dede Yusuf, dari PPP tercatat Emilia Contessa, dari partai Demokrat ada pelawak Nurul Qomar, Adjie Massaid, Anna Tairas, serta Putri Indonesia Anggelina Sondakh, dari PDK tercatat Muchsin Alatas, Partai Patriot ada Marini dan Hengky Tornado, dan lain sebagainya.

Menjelang Pemilu legislatif 2009, partai-partai politik berusaha menggalang para artis dan kalangan selebritis dengan memasang namanya untuk menjadi Caleg.Kehadiran para selebritis, dinilai bahwa para kandidat terjebak untuk mendongkrak populeritasnya guna mengarahkan pemilih (*voter*).Keberadaan artis dahulu dalam politik, terutama di masa orde baru dianggap hanya "gula-gula" atau pemanis dalam setiap program partai politik.Kedudukan mereka hanya sebagai penyokong atau pendukung (*endersor*) dalam program partai politik, terutama kampanye.

Nilai selebritis dianggap begitu berdaya mengerahkan dan menggiring khalayak. Sosok artis begitu lebih dikenal dan populer oleh rakyat karena kemampuan media massa yang andal dalam melancarkan kultivasi informasinya. Begitulah dunia politik jika diwarnai dengan pernak-pernik selebritis.

[67]Kompas, 10 Maret 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Uang Sebagai Alat Pembeli Perhatian Publik

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati atau walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakila Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan secara langsung. Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak terutama di kalangan para politisi dan elit daerah harus memasang kuda-kuda dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilihan pimpinan daerah.

Banyak masalah krusial yang bisa timbul dalam Pilkada sehingga bisa memicu terjadinya tindak kekerasan atau anarkis, dengan banyaknya tangan yang menangani pilkada membuat potensi konflik semakin tinggi.Aksi anarkis yang terkait dengan pemilihan kepala daerah serta aksi-aksi perkelahian antarkelompok dimasyarakat menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, kesadaran masyarakat berdemokrasi baru sebatas *lip service.*

Jika dicermati kerawanan yang bisa memicu sumber konflik dalam pemilihan kepala daerah, apakah itu pada tingkat provinsi atau kabupaten dan kota, dapat diidentifikasi, dikarenakan dampak pemekaran daerah sehingga menjadi ajang perebutan kekuasaan di kalangan elit politik. Isu *money politics* disebabkan tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang relatif rendah.Fanatisme kubu golongan politik dan keluarga yang sangat menonjol sehingga kadang tidak rasional dan menimbulkan sikap siap menang, tetapi tidak siap kalah.

Money politics bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, bisa jadi proses demokrasi yang berlangsung selama pilkada akan menghasilkan pemimpin yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah kualitasnya karena pengaruh politik uang, atau berlangsung dalam situasi yang penuh dengan tekanan.

Itulah warna politik Indonesia pada tingkat bawah.Pada satu sisi orang berteriak untuk menegakkan demokrasi, pada pihak lain mereka tidak siap menerima kekalahan. Akibatnya tindakan brutal sebagai salah satu bentuk pelampiasan kekecewaan sering menimbulkan koban.

Pilkada dimata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elit politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Partai politik yang seharusnya menjadi instrument untuk menilai calon yang paling baik bagi masyarakat, cenderung lebih mementingkan calon-calon yang loyal kepada atasan daripada calon di luar partai yang memungkinkan dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi kepala daerah.

Suatu bentuk pendidikan politik yang perlu dipelajari oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, yakni kalah ataupun menang tidak ada masalah, meskipun kalah, harus siap secara jujur mengakui keunggulan lawan, tidak perlu malu dan memutuskan silaturrahmi karena hanya kekuasaan sesaat.

Terkadang di ranah kebudayaan pepolitikan negeri ini memperlihatkan praktek strategi politik yang tidak sabaran. Semacam otoritas dan kekaguman yang tidak berarti.Ketika lebih dalam ditelisik jelang Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang tinggal beberapa hari lagi, bisa saja yang secara naluriah politik para politisi tersebut mencari peluang kesenangan-kesenangan politik, maka para politisi serupa makhluk hidup yang tidak ramah menghadapi strategisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semiotika itu teramat kental teridentifikasi dengan kemunculan isu-isu bahasan yang bersifat politis, tidak terlepas dari penandaan strategi politik karena musim kampanye pada pemilihan umum, dan pada sisi yang bersamaan pula ia mengajarkan kepada publik suatu kesan bahwa para politikus itu loyalitas sosialnya yang terpenting kepada ajang pemilihan. Ajang pemilihan dalam hal ini, ujung-ujungnya adalah perebutan kekuasaan, sehingga argumentasi politis merupakan simbol bagi mereka dalam kapasitas perang politiknya yang biasanya dikenal dengan pesta demokasi.

Padahal sesungguhnya dalam strategi politik, bahwa politik bukan sekedar meramaikan jalannya daya kontrol, kritisi maupun di forum-forum demokrasi lainnya.Namun ujungnya politik harus mampu bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.Dalam kenyataannya harapan itu masih harus kita wujudkan, selain itu, demokrasi juga harus secepatnya menurunkan angka kemiskinan, menciptakan kestabilan ekonomi, maupun meningkatkan kesejahteraan.

Sayangnya, dalam dunia politik saat ini, kekuasaan menjadi ukuran keberhasilan para politisi meskipun tidak semua politisi membuahkan kemanfaatan bagi masyarakat.Meski demikian, partai politik dan para politisi pun butuh demokrasi dan kekuasaan, tapi tentu saja kekuasaan yang sehat, kaya intelektualitas, dan spiritualitas, serta amanah yang selalu memiliki korelasi positif bagi kemakmuran.

Praktik-praktik politik nampaknya memperlihatkan sifatnya yang problematik, dari sini juga masyarakat nampaknya bisa berselisihan aplikatif politik.Jangan sampai maraknya daya kritis politikus belakangan ini bagian dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek-praktek politik yang muncul dalam peradaban kita dari lingkungan perselisihan.

Oleh karena itu, praktek-praktek politik pada pokoknya berusaha menyampingkan pertentangan diantara konsepsi, kebijakan, serta ambisi-ambisi yang saling bertabrakan dapat teredam.Dengan demikian, masyarakat kita merupakan masyarakat yang cenderung sangat bersifat pruralis termasuk dalam aspirasi politiknya, terakomodasikan dan terlihat bukan sebagai antara warna bendera politik yang satu dengan lainnya.

Jelaslah pada kenyataan bahwa pencarian orientasi di dunia politik bukan hanya ditujukan untuk mendapatkan suatu responsif lewat hal tersebut, padahal sudah sekian lama kita memerlukan dunia politik sebagai suatu tempat yang mempunyai arti yang penting.Dengan demikian terpenting dan urgen dalam masa kini adalah kita menghendaki struktur politik yang mencerminkan partai politik akomodatif dan solid, dari sini yang diperlukan adalah pemimpin politik sebagai paradigma nilai-nilainya.

Jadi, diharapkan daya kritisi para politisi bukanlah cara-cara untuk mencari bentuk-bentuk tindakan politik parsial atau kemelencengan tindakan politik untuk mencapai tujuan-tujuannya.Melainkan di sini yang diinginkan adalah sistem politiksebagai penuntun tatanan hal-hal yang benar dalam berpolitik.

Dalam kasus-kasus politik, kerap pula ada beberapa sinyalemen dengan adanya para politisi yang saling mengkritisi keadaan walau secara eufisme. Untuk membuat hal-hal yang bersifat partisipatif terhadap masyarakat, konstituennya juga, para politisi harus menguatkan pengertian pendidikan politik, tidak lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai operator layaknya negara menyelesaikan kemaslahatan masyarakat. Jadi para politisi dapat juga berfungsi sebagai penjelas atau pengkodifikasian pengertian yang lengkap tentang gambaran gerakan sosial dengan menuntut kewajiban negara mensejahterakan rakyat harus dilaksanakan tetap sasaran. Praktek-praktek politik yang berkaitan dengan hirarki fungsi sosial itu bisa saja serasi dengan hirarki dengan praktek sosial masyarakat, namun tak seenaknya main interpelasi ataupun argumentasi sebagai bukti kejelasan terepresentasikannya hal tersebut.

3. Peran Media Sebagai Modal Kekuasaan

Menurut prespektif komunikasi politik, didunia politik pengaruh pers dan media sangat penting utuk mendongkrak citra seseorang, kelompok, bahkan politisi yang terkait dalam partai.

Hubungan antara media dengan politisi atau pemerintah sudah berjalan sekian lama, dan hubungan itu bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan antara keduanya, bukan saja karena wartawan membutuhkan para politisi atau pejabat pemerintah sebagai sumber informasi (*maker of news*), tetapi juga para politisi maupun pejabat pemerintah memerlukan media untuk menyampaikan pikiran-pikirannya maupun kebijakan yang mereka ambil untuk kepentingan orang banyak. Tidak heran jika para wartawan sering tampak bergerombol di depan gedung istana, parlemen, kantor kementrian, kantor gubernur atau bupati, menunggu kesempatan untuk mewawancarai para politisi tersebut.Hubungan antara media dengan politik dapat dilihat sebagai suatu hal yang sangat menarik, terutama ketergantungan antara sumber berita dengan pihak yag diberitakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu fungsi klasik media massa adalah menjadi wacana pembentukan pendapat umum. Melalui berita, komentar, editorial, dan artikel yang dimuat di surat kabar, serta wawancara yang dilakukan dalam media televisi dapat menimbulkan berbagai macam tafsiran dan pendapat yang berbeda-beda dari kalangan pembaca atau pemirsa. Oleh sebab itu, media massa tidak hanya bisa dilihat dari aspek sebagai industri hiburan dan informasi saja, tetapi juga sebagai sarana pembentuk pendapat umum.

Dengan kemampuan media massa membentuk pendapat umum, aktivitas para politisi dan para pengambil kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dengan peran media. Para politisi menjadikan media sebagai saluran untuk memperkenalkan gagasan-gagasan mereka kepada anggota masyarakat, sebagai sarana pembentuk pendapat umum.Untuk melihat wajah, penampilan, kecerdasan dan keterampilan berkomunikasi seorang calon pemimpin, media massa bisa dijadikan sebagai saluran untuk mempertemukan calon yang akan dipilih dengan masyarakat pemilih.

Melalui televisi, penonton dapat melihat dan mempelajari karakter, wajah, kecerdasan dan kemampuan, pengalaman serta program yang dilontarkan oleh calon politik.Sehingga mereka tahu siapakah yang pantas menjadi pemimpin.

Melalui televisi, mereka dapat mengetahui calon pemimpinnya. Melalui televisi, para pemilih dapat memberi penilaian pada kandidat yang diunggulkan, apakah pantas menjadi pemimpin atau tidak. Para pemilih juga ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil si calon pemimpin yang terpilih untuk lima tahun mendatang. Mereka juga ingin menilai, apakah debat itu dapat menyentuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang substansial terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, isu apa saja yang menjadi prioritas yang ditonjolkan oleh para calon pemimpin.

Masyarakat sebagai makhluk politik sangat peka dengan ha-hal yang bersifat agitasi, persuasi, propaganda, dan perang urat saraf, sebab sebagai manusia ia memiliki kebebasan untuk memilih yang terbaik menurut pikiran dan penalamannya.

Dalam konteks komunikasi politik, ruang public (*public sphere*) misalnya media massa yang dapat digunakan untuk memasarkan partai beserta cita-cita dan programnya. Surat kabar misalnya memiliki rubrik yang disediakan untuk wawancara para politisi, televisi dan radio juga memiliki program interaktif yang biasanya diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat (*public figure*) untuk berkomunikasi dengan masyarakat.Ruang publik seperti persimpangan jalan, tembok, madding umum, juga dapat dimanfaatkan untuk memasang tanda gambar, reklame, baliho, pamflet guna menarik perhatian masyarakat.Seorang politisi harus mampu membaca dan melihat peluang seperti ini sebagai tempat atau ruang yang harus dimanfaatkan untuk memasarkan kegiatan politiknya.

Sejatinya film kentut mengandung muatan ideologis. Ternyata sesuatu yang hendak ditertawai adalah negeri Indonesia sendiri, sama persis yang ditertawai oleh duo pembuat film Deddy Mizwar dan Aria Kusumadewa dalam dua film terdahulu mereka yaitu, identitas dan alangkah lucunya negeri ini. Taktik ini berfungsi mengajak penonton untuk menertawai kondisi faktual dari lakon figur publik yang diperankan yakni para calon legislatif. Ketiga film sama-sama mencibir pada pelaksanaan politik di negeri kita. Perbedaan mungkin hanya terdapat pada fokus objek cibiran. Identitas mencibir tata birokrasi, alangkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lucunya negeri ini mencibir mental politik masyarakat, dan kentut mengolok-olok kebiasan para (calon) pemimpin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id